

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul R, S. (2017). Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus (Tambra23, Ed.; 6 ed.). K E N C A N A.
- Adib sofia. (2017). Metode Penulisan Karya Imiah (Nugraha hilyas, Ed.; revisi) Bursa Ilmu.
- Amir ilyas. (2022). Kumpulan Asas Hukum (Nurdiansyah, Ed.; 1 ed.). K E N C A N A.
- Atmadja, I. D. G. (2018). Asas-asas hukum dalam sistem hukum. Kertha Wicaksana,12(2), 145–155.
- Andra Jayanti. (2020). Hak Pengelolaan Lahan Untuk Investasi, Instrumen dan model perlindungan hukum (mh DR. Ufran sh., Ed.; 1 ed.). Genta publishing.
- Boedi Harsono. (2013). Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi Dan Pelaksanaanya (Prof. Boedi Harsono,Ed.; 1 ed.). Universitas Trisakti.
- Carl Joachim Friedrich. (2004). Filsafat Hukum Presfektif Historis (Rano, Ed.; 1 ed.). Penerbit Nuansa.
- Djoni sumardi gozali. (2021). Ilmu Hukum Dan Penelitian Ilmu Hukum (Melania, Ed.; 1 ed.). UII Press Yogyakarta.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick. (2013). Hukum Responsif (Raisul muttaqien,Ed.; 7 ed.). Nusa Media.

- Nurhasan ismail. (2018). Hukum Agraria dalam tantangan perubahan (Rahardian tegar, Ed.; 1st ed.). Setara press.
- Nia kurniati. (2016). hukum agraria sengketa pertanahan penyelesaiannya melalui arbitrase dalam teori dan praktik (Dinah sumayyah, Ed.; 1st ed.). PT Refika Aditama.
- Prasetio, Y. F. (2023). Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum.
- Rosnidar sembing. (2019). Hukum pertanahan adat (kharisma putra utama, Ed.). PT Rajagrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. (2010). Penegakan Hukum Progresif (Aloysius Soni BL de Rosari, Ed.; 1 ed.). PT Kompas Media Nusantara.
- Saim Aksinudin. (2022). Hukum pertanahan kompleksitas problem pertanahan di Indonesia (Dana ari & tim layout inteligensia media, Eds.; 1st ed.). inteligensia media.

B. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah Dan Benda-Benda

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021.

Keppres Nomor 5 Tahun 1992

Keppres No 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah
Negara

PMA/Ka.BPN No.5 Tahun 1999

Permen ATR No. 18 Tahun 2019 Tentang “Tata Cara Penatausahaan Tanah
Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

PP Nomor 40 Tahun 1996 Menambahkan Guna Perusahaan Perkebunan

C. Sumber Hukum Lain

Andi Al Hakim. (2022, Juni 1). Pancasila Sebagai Philosophische Grondslag
Dan Kedudukan Pancasila Dikaitkan Dengan *Theorie Von Stafenufbau
Der Rechtsordnung*.
[https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13144/Pancasila-
Sebagai-Philosophische-Grondslag-Dan-Kedudukan-Pancasila-Dikaitkan-
Dengan-Theorie-Von-Stafenufbau-Der-Rechtsordnung](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13144/Pancasila-Sebagai-Philosophische-Grondslag-Dan-Kedudukan-Pancasila-Dikaitkan-Dengan-Theorie-Von-Stafenufbau-Der-Rechtsordnung)

Aspirasi Konstitusi, M. (2018). EVALUASI TERHADAP IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945 JURNAL MAJELIS.

BBC News indonesia. (2023, September). No Title. *bbc news indonesia*. hak
pengelolaan atas tanah-tanah adat

BP Batam. (2023, Oktober 5). [https://bpbatam.go.id/en/bp-batam-pemegang-
hpl-rempang-dan-galang/](https://bpbatam.go.id/en/bp-batam-pemegang-hpl-rempang-dan-galang/)

Boru Sitanggung, M., Rizqi Maulana, I. P., Angelica, L., Galih Prasetyo, A.,
Putri Kurmiati, E., Lintang Kirana, M., & Pajrin, R. (2024). SEJARAH
TERBENTUKNYA UU NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG
KETENTUAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (UUPA) DAN

IMPLEMENTASINYA DITINJAU DARI AWAL LAHIRNYA HUKUM AGRARIA DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 4. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>

Cahyono, O.: (2023). Penyelesaian Sengketa Berbasis Konsep “*Economic Analysis of Law*.”

Fadillah, N. (2022). Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(1), 45–65.

Frenki, F. (2011). Politik hukum dan perannya dalam pembangunan hukum di indonesia pasca reformasi. *ASAS*, 3(2).

Grand Teori dan Middle Range Teori » *maglearning.id*. (2021). <https://maglearning.id/2020/08/02/grand-teori-dan-middle-range-teori/>

Kantor berita politik RMOL.ID Republik Indonesia. (2023, September 11). <https://nusantara.rmol.id/read/2023/09/18/589545/ngotot-gusur-warga-pulau-rempang-gigin-praginanto-ternyata-ada-kepentingan-bisnis-dua-menteri-jokowi>

Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).

Muchtar, H. (2023). *Analisis Yuridis Normatif ... 80 ANALISIS YURIDIS NORMATIF SINKRONISASI PERATURAN DAERAH DENGAN HAK ASASI MANUSIA*.

Muhamad Abdul Ghofur. (2021, Juni 11). *Grand Teori dan Middle Range Teori* – *maglearning.id*. [maglearning.id. https://maglearning.id/2020/08/02/grand-teori-dan-middle-range-teori/](https://maglearning.id/2020/08/02/grand-teori-dan-middle-range-teori/)

Nugroho, W. (2017). Rekonstruksi teori hukum pembangunan Kedalam pembentukan perundang-undangan lingkungan hidup dan sumber daya alam pasca reformasi Dalam bangunan negara hukum. *Jurnal Legislasi*

Indonesia, 14(4), 369–382.

- Raden Intan. (2020). *PENGUASAAN SUMBER DAYA ALAM OLEH NEGARA (PASAL 33 AYAT 3 TENTANG AGRARIA)* – Pers Mahasiswa Raden Intan. <https://persma.radenintan.ac.id/2020/12/17/pasal-33-ayat-3-tentang-agraria/> *Arti kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. (n.d.). Retrieved July 5, 2024, from <https://kbbi.web.id/>
- Rejekiningsih, T. (2016). Asas fungsi sosial hak atas tanah pada negara hukum (suatutinjauan dari teori, yuridis dan penerapannya di indonesia). *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(2), 298–325.
- Sulisrudatin, N. (2018). Keberadaan Hukum Tanah Adat dalam Implementasi Hukum Agraria. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 4(2). *tvonenews.com*. (2023, September 28). <https://www.tvonenews.com/berita/155718-temuan-baru-ombudsman-bp-batam-ternyata-belum-kantongi-sertifikat-hak-pengelolaan-lahan-pulau-rempang>.
- Saim Aksinuddin, DKK. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Kasus Tumpang Tindih Pada Sebagian Bidang Tanah Yang dikuasai oleh Dua Pihak Pemilik Sertipikat Hak Milik. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).
- Hutama, W. R. (2021). Eksistensi Hak Ulayat Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019. *Notaire*, 4(3), 489. <https://doi.org/10.20473/ntr.v4i3.28036> Kasus Rempang Eco City Bergulir di MK | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.). Retrieved July 26, 2024, from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19698&menu=2>.
- Limbong, D. (2017a). Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 1–9.
- Putra, M. (2017). Keberadaan Tanah Adat dan Tanah Negara Bagi Kepentingan Masyarakat. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 230–

241.

- Rahman, R. (2017). Konflik masyarakat dengan pemerintah (studi kasus sengketa tanah adat). *Sosioireligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 2(1).*Repository Uin.* (2024).
- Resmini, W. (2019). Hak Atas Tanah Adat Dan Permasalahannya. *Ganec Swara*, 13(1), 120–125.
- Sari, I. (2020). Hak-hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1).
- Suwitra, I. M. (2010). Dampak Konversi Dalam UUPA Terhadap Status Tanah Adat di Bali. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(1), 103–118.